

TAJUK RENCANA

Hendak Kemana Pendidikan Kita?

DRAFT terbaru revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kembali menuai polemik. Pasal-pasal yang diajukan pemerintah melalui Kemendikbud-ristek dinilai tidak menjawab persoalan klasik pendidikan : kualitas pendidikan, fasilitas pendidikan, pemerataan pendidikan, guru honorer, kurikulum yang terlampaui membebani anak didik. Problema klasik pendidikan yang perlu kesamaan cara pandang dalam penyelesaian. Dari kesamaan pandang itu lah kemudian akan dapat menjawab problema kontemporer pendidikan : otonomi, komersialisasi bahkan liberalisasi pendidikan dan yang lain. Serta menentukan langkah hendak dibawa kemana arah pendidikan masa depan.

Anehnya, pemerintah lewat Kemendikbud-ristek justru membawa perjalanan revisi UU Sisdiknas ini pada persoalan-persoalan yang berbeda bahkan sensitif sehingga menimbulkan polemik. Diawali dengan isu tanpa peta jalan pendidikan yang transparan, hilangnya frasa madrasah dan yang terbaru adalah hilangnya ayat-ayat mengenai tunjangan profesi guru (TPF). Persoalan yang sontak membuat PB PGRI merapatkan barisan. Tudingan Kemendikbud-ristek tidak menghargai profesi guru dan dosen pun langsung dilontarkan.

Ijangan coba-coba mempersulit sertifikasi, kenaikan pangkat, dan yang paling melukai rasa keadilan adalah menghapuskan TPG di RUU Sisdiknas yang didaftarkan dalam prolegnas. Kami menuntut pasal itu dikembalikan,” tegas”Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (28/8). Suara lantang nya juga mengingatkan realita, masih banyak guru ri dosen terutama di sekolah atau perguruan tinggi swasta yang belum mendapat gaji memadai, bahkan memenuhi upah minimal provinsi/kabupaten/kota. Meski tidak antiperubahan Unifah meminta agar pemerintah jangan berbuat curang dengan menghilangkan pasal TPG. Bahkan disebut bila TPG guru itu tidak seberapa bila dibandingkan tunjangan kinerja birokrat. (KR, 29/8).

’Genderang perang’ seakan ditabuh PB PGRI. Sementara usulan agar pembahasan revisi UU Sisdiknas janganlah terburu-buru, atau seogiangnya ditunda. Bahkan Presiden Jokowi ketika menerima Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan tidak ingin lagi setiap ganti menteri ganti kurikulum, namun tampaknya memang perlu adanya revisi-revisi agar pendidikan bisa menyesuaikan tuntutan zaman dan tuntutan dunia kerja. Tentu perubahan yang dilakukan adalah sesuai amanat Konstitusi UUD : *menderdaskan kehidupan bangsa*.

Dan momentum era 4.0 menuju *society 5.0* sejatinya merupakan waktu tepat melakukan perubahan sistem pendidikan nasional. Perubahan yang mengarah dan menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) unggul menyambut Indonesia Emas, 2045. Bukan hanya di tingkat nasional, namun regional dan global. Pendidikan untuk masa depan ini harus mampu menghasilkan manusia Indonesia yang mampu berfikir dan bergaul global tanpa meninggalkan jatidiri bangsa.

Namanya revisi, tentu bukan membongkar habis undang-undangnya. Kemendikbud-ristek perlu menyadari bila revisi UU Sisdiknas ini adalah untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas manusia Indonesia masa depan, dari aspek pendidikannya. Perubahan yang mampu menyeimbangkan *intellectual quotient, emotional quotient, spiritual intelligence* (IQ, EQ, SI). Sehingga, perubahan tersebut adalah menderdaskan kehidupan bangsa termasuk meningkatkan ketakwaan, mudah melakukan tolong menolong, memperkuat nasionalisme, gotongroyong, meninggikan tatakrama atau etika, memperkuat toleransi serta berkeadilan. Semua ini hakikatnya adalah ruh Pancasila, falsafah bangsa.

Filosofi Pancasila tentu menjadi dasar revisi UU Sisdiknas. Artinya di situ ada keadilan, toleransi, musyawarah mufakat dan lainnya. Karena pendidikan itu untuk masa depan, investasi jangka panjang. Dan hasil pendidikan saat inilah yang akan menentukan Indonesia Emas,. Bukan membuat Indonesia cemas. □

TEBBAKAU merupakan komoditi dipandang dari sudut ekonomi, pantas diperhitungkan menguntungkan petani. Berbagai upaya dilakukan agar hasil tembakau berkualitas, bisa terserap pabrik rokok. Mengambil lagu yang dinyanyikan Farel Prayoga ciptaan Abah Lala yang telah menghentak di upacara tujuh belasan di istana negara, tembakau ’aja Dibandhingke’ dengan komoditi yang lain.

Komoditi lain selain tembakau menguntungkan petani dan masyarakat pengguna. Sedangkan tembakau tidak menguntungkan masyarakat pengguna. Tembakau mengganggu kesehatan, telah banyak difahami. Sehingga diperlukan suatu kebijakan pengendalian tembakau yang bisa melindungi semua kepentingan. Bukankah Indonesia sedang mengagagas Membangun membangun generasi emas melalui kendali konsumsi rokok?

Tidak Terbantahkan

Bukti ilmiah bahwa rokok menyanadu dan merusak kesehatan tidak terbantahkan di seluruh dunia. Data di Indonesia yang perlu mendapat perhatian adalah jumlah perokok Indonesia bertambah 8,8 juta orang dalam satu dekade (GATS 2021). Setiap rumah tangga membakar Rp 382.091 per bulan untuk rokok (GATS 221) dan rokok adalah penyumbang terbesar kedua kemiskinan di Indonesia (BPS 2021).

Indonesia, merupakan salah satu negara yang tinggi mengkonsumsi rokok bahkan rokok juga dikonsumsi anak dan remaja dibawah 18 tahun. Global Youth Tobacco Svey Indonesia tahun 2019 menyatakan, anak usia 13 - 15 tahun, 39,6% pernah merokok dan 18,8% saat disurvei merokok. Pertumbuhkembangan anaknya perokok dibanding anaknya non-perokok, kemungkinan stunting anak perokok lebih 5,5% dibanding anaknya non perokok.

Faktor - faktor penyebab perokok anak antara lain keluarga, pendidikan, jualan eceran, iklan, kawan dan harga



KR-JOKO SANTOSO

kronis akibat rokok pun sudah menyering orang-orang muda. Meningkatnya perokok muda, memunculkan pertanyaan, 2045 menjadi generasi emas atau cemas ?

Pembatasan

Penanggulangan merokok perlu dilakukan melalui kebersamaan antar lembaga. Dimulai dari DPR sebagai pembuat perundang - undangan, Kementerian Kesehatan sampai pemerintah daerah sebagai pembuat peraturan operasional untuk melakukan kebijakan serta melibatkan masyarakat. Pembinaan diperlukan, antara lain pembatasan iklan rokok, pembatasan usia pembeli rokok serta meningkatkan edukasi secara masif kepada masyarakat. Kawasan tanpa rokok (KTR) yang

Larangan Polri Pamer Kemewahan, Efektifkah?

SEJAK dilantik 27 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuat cukup banyak gebrakan di institusi polri. Mulai dari mutasi jabatan sejumlah petinggi di Mabes Polri hingga membuat program dengan menggandeng sejumlah pihak agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri semakin lebih baik.

Segudang prestasi dan penghargaan pun dirahi baik tingkat nasional maupun internasional. Namun kepercayaan publik terhadap institusi polri bak sekejap mata terjun bebas hingga menyentuh angka 50% dengan kasus berencana terhadap Brigadir J.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Rabu (24/8), Adies Kadir dari Komisi III DPR RI menyoroti perilaku dan gaya hidup polri masa kini. Menurutnya, jajaran Kapolri ke bawah seperti eraja-raja kecil di daerah masing-masing. Dan sepertinya bukan hal yang baru soal perilaku dan gaya hidup mewah bagi sebagian oknum anggota polri dan keluarganya.

Gaya Hedonis

Sebenarnya sudah ada larangan bagi polisi pamer kemewahan. Kapolri era Jenderal Polisi Idham Aziz pada November 2019 pernah membuat gebrakan berupa larangan pamer kemewahan (gaya hedonis) di ruang publik termasuk di media sosial. Larangan pamer kemewahan tersebut tercantum dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/30/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019.

Surat Telegram Kapolri Idham Aziz saat itu berisi tentang peraturan disiplin anggota Polri, Kode Etik Profesi Polri dan kepemilikan barang mewah

Baharuddin Kamba

oleh pegawai negeri di institusi polri. Larangan tidak boleh menampilkan kekayaan tidak hanya di lingkungan pekerjaan tetapi juga di media sosial. Surat larangan itu menyebutkan bahwa institusi polri meminta untuk bersikap sederhana sejalan dengan cita-cita mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih khususnya di institusi polri.

Ada tujuh poin larangan di antaranya tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan polri maupun di area publik termasuk di media sosial. Hal lainnya yakni tidak mengunggah foto atau video di media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karaan dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Namun, apakah aturan larangan polisi pamer kemewahan di era Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz masih berlaku di era Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo?

Perlu Teladan

Sudah menjadi kodrat alam bergaya hidup sosialita. Namun aturan dan larangan bagi korps Bhayangkara/Bhayangkari setidaknya bisa jadi ajang mencari sosok yang bisa menjadi teladan hidup bagi semua anggota polri. Dengan hidup kesederhanaan, jauh dari kata hedonis dan jauh dari pamer kemewahan serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi polri yang saat ini tengah menjadi

saat ini telah ada, perlu diperluas. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain, tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok. Racun yang dikandung asap rokok yang masuk ke dalam tubuh secara kumulatif akan tersimpan dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. KTR menjadi salah satu upaya efektif untuk melindungi masyarakat dari asap rokok agar dapat menikmati udara bersih dan sehat.

Peraturan pembatasan usia menjual, membeli dan mengonsumsi rokok harus ditegakkan, karena efektif memperkuat implementasi dan penegakan berbagai aturan terkait rokok. Tidak boleh lagi ada anak di bawah usia 18 tahun menjual, membeli, apalagi mengonsumsi atau mengisap rokok. Orang dewasa tidak boleh melibatkan anak-anak dalam aktivitas tersebut. Penjual rokok harus memastikan pembelinya sudah di atas 18 tahun atau sudah mempunyai KTP. Ini aturan yang harus mulai ditegakkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Perlu kebijakan tegas demi tercapainya masyarakat dengan hidup sehat. □

*) **Dr Dra IM Sunarsih SU Apt,**
Penasehat TP PKK DIY, Ketua I YKI Cabang Koordinator DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opini-kr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA



pikiranpembaca@gmail.com



0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Parkir di Jalanan Sekitar Ketep Pass

KAWASAN Ketep Pass merupakan kawasan wisata alam yang udaranya sejuk dan alamnya juga sangat indah. Selain itu, rute tersebut merupakan jalur alternatif pula bagi perjalanan dari Yogya menuju Kabupaten Magelang di bagian Timur. Selain sebagai objek wisata, Kawasan itu juga menjadu rute alternatif perjalanan. Tidak heran, meski bukan hari libur, Kawasan itu selalu ramai lalu lintasnya.

Kini penjualan makanan, jagung dan minuman panas juga tampak se-

makin berkembang. Memang sungguh sangat nikmat, menikmati makanan dan minuman panas sembari duduk-duduk memandang alam yang indah dengan udara yang sejuk. Namun karena lokasinya di pinggir jalan maka alangkah baiknya parkir meraka yang leshan menikmati makanan ditata dengan lebih baik. Mengingat di kiri kanan untuk berjualan dan juga menjadi tempat parkir di depannya. Dengan demikian, akan membuat arus lalu lintas tetap lancar. □

Heri Tri, Wates Kulonprogo

Kota tanpa Angkutan Kota

YOGYA itu istimewa, Saking istimewa nya, tidak banyak dipahami bila kota ini tanpa angkutan kota yang selalu memenuhi jalanan, sebagaimana kota lain di negeri ini. Di kota ini hanya ada TransJogja itupun sepi penumpang. Tidak sebagaimana angkutan trans di kota lain.

Bagi saya yang dari Bogor, rasanya aneh melihat situasi ini.

Karena biasa melihat buskota atau angkutan kota lain yang penuh sesak, namun di kota ini tidak ada sama sekali. Yang kian aneh, meski tanpa angkutan kota namun pada jam berangkat atau pulang sekolah / kantor, jalanan akan penuh sesak dan macet. Apalagi kalau ada angkutan kota? □

Hasanuddin, Cibinong Bogor

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efty Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, Wakil : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP